



Kinerja Konselor pada Sekolah yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas

Efa Yuni Prastiti✉

SMP Islam Terpadu Al Umar Ngargosoka Srumbung, Magelang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 12 Agustus 2017
Disetujui 15 Agustus 2017
Dipublikasikan 30 September 2017

Keywords:

performance of a counselor;
no allocation class hours

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kinerja konselor di SMA Negeri 1 Muntilan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 Muntilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Pengujian keabsahan data menggunakan ketekunan pengamatan, member check, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan pada bagian perencanaan program BK sudah baik, pada bagian pelaksanaan program BK dilakukan secara insidental sehingga pelaksanaannya kurang optimal, bagian evaluasi sudah cukup baik dibuktikan dengan laporan evaluasi, dan pada bagian mekanisme kerja administrasi sudah sangat baik dengan bukti administrasi BK yang disusun sangat sistematis dan lengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja konselor di SMA Negeri 1 Muntilan kurang maksimal pada pelaksanaannya karena tidak memiliki jam masuk kelas.

Abstract

The purpose of this research is to know and analyze performance counselor at high schools 1 muntilan. The research is qualitative research with a case study. Research locations is high schools 1 muntilan. Technique data collection used is interview, observation, documentation. Technique data analysis use the model miles and huberman. Testing the validity of data using perseverance observation, member check, and triangulation. The research results show on the program planning bk is good, on the the implementation of the program bk be done in incidental so the implementation of less than optimal. The evaluation is good enough evidenced by evaluation report, and on the working mechanism is good administration a administration bk compiled very systematic and complete. So that it can be concluded that the state sma counselor at 1 muntilan less than maximum in implementation because they do not have hours class

How to cite: Prastiti, Efa Yuni. (2017). Kinerja Konselor Yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas. *Indonesian Journal Of Guidance And Counseling: Theory And Application*, 6(3). 15-21

© 2017 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi:

SMP Islam Terpadu Al Umar Ngargosoka Srumbung, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia.
Email: faa.efa@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa dan Negara, sebab pendidikan mampu memfasilitasi individu dalam mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya untuk mencapai tingkat kedewasaan (Munib, 2011). Sehingga pendidikan bisa dikatakan sebagai usaha dari pemerintah untuk memfasilitasi individu dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan potensi individu, pendidikan tidak hanya cukup jika hanya dilakukan dalam proses KBM di dalam kelas namun juga harus disertai dengan pendekatan lain. BK sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan ikut andil dalam rangka pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh. BK bertujuan untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (Prayitno, 2004)

Pelaksanaan layanan BK berbeda dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilakukan oleh guru mata pelajaran di dalam kelas. BK dilaksanakan melalui berbagai layanan dengan mempertimbangkan kehidupan pribadi, kehidupan social, pengembangan kehidupan belajar, dan perencanaan karir (Winkel, 2012). Bentuk pelayanan bagi peserta didik dapat dikembangkan dengan menggunakan berbagai cara. Dalam pelaksanaannya sekolah-sekolah menganut pola 17+ yang di dalamnya meliputi 6 bidang bimbingan, 9 layanan BK dan 5 kegiatan pendukung.

Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan UU serta peraturan yang mengatur kompetensi menjadi seorang pendidik, hal ini tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 yaitu pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Sebagai salah satu tenaga pendidik tugas seorang konselor sendiri adalah memberikan layanan bimbingan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut tertuang dalam lampiran peraturan

menteri pendidikan nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang SKAKK. Jadi dalam hal ini konselor berhak memberikan pembelajaran/ memberikan bimbingan pada peserta didik berdasarkan kompetensi akademik dan profesional yang dimiliki oleh konselor.

Pelaksanaan pelayanan BK sering mengalami perubahan. Pada kurikulum 2013 pelaksanaan BK disebut dengan layanan peminatan. Adanya kurikulum peminatan ini mengakibatkan tugas dan tanggung jawab konselor menjadi semakin berat, sebab konselor diharuskan mengarahkan peserta didik untuk memilih program studi lanjut di awal tahun pelajaran. Berkenaan dengan hal itu, Menteri Pendidikan mengeluarkan Permendiknas No. 81A Tahun 2013 tentang jam masuk kelas bagi BK. Jam masuk kelas bagi BK ekuivalen dengan 2 jam pembelajaran, dan lamanya 1 jam pembelajaran dan disesuaikan dengan jenjang sekolah masing-masing. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa alokasi jam masuk kelas bagi BK untuk SMA adalah 2 (dua) jam per kelas per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal (Wibowo, 2013)

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang kurang begitu memahami posisi BK pada kurikulum 2013. Beberapa sekolah tidak memberikan alokasi jam masuk kelas bagi BK. Mereka berasumsi bahwa BK bisa memberikan layanan di luar jam pembelajaran. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi konselor sekolah. Kinerja konselor jadi terhambat sebab konselor sekolah memerlukan jam masuk kelas untuk melaksanakan layanan klasikal.

Tidak adanya jam masuk kelas bagi BK tentunya memberikan dampak tersendiri bagi kinerja konselor. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Salmawati (2010) terkait dengan kinerja konselor dalam menghadapi siswa pubertas di MTs Negeri 3 Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja konselor masih kurang baik pada segi teknik pelaksanaan dan administrasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya alokasi jam masuk kelas bagi konselor sekolah di MTs Negeri 3 Surabaya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Novianto (2013) menunjukan bahwa sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas untuk BK, program BK yang telah dibuat pelaksanaannya menjadi terhambat bahkan mungkin tidak bisa terlaksana. Sangat disayangkan jika program yang telah dibuat tidak bisa terlaksana dan hanya berfungsi sebagai administrasi saja.

Dari penelitian terdahulu diatas, tampak bahwa kinerja konselor pada beberapa sekolah bisa dikatakan kurang baik karena tidak adanya alokasi jam masuk kelas bagi BK. Kinerja adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja (Mulyasa, 2004). Sebagai seorang tenaga pendidik konselor bertugas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan kegiatan BK. Tugas dan tanggung jawab konselor terdiri dari perencanaan program BK, pelaksanaan program BK, evaluasi program BK, dan mekanisme kerja administrasi program BK.

Namun berbeda dengan SMA N 1 Muntilan yang merupakan sekolah favorit di Kabupaten Magelang. SMA N 1 Muntilan mampu mencetak peserta didik yang berprestasi, tidak hanya prestasi dalam bidang akademik namun juga prestasi dalam bidang non-akademik. Prestasi yang diperoleh peserta didik tentunya tidak lepas dari peran guru BK di SMA N 1 Muntilan. Meski tidak memiliki alokasi jam masuk kelas mampu memberikan layanan BK dengan cukup baik.

Menanggapi permasalahan tentang kinerja konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas, maka penelitian pendahuluan dilakukan di SMA Negeri 1 Muntilan. BK di SMA Negeri 1 Muntilan menggunakan pola 17+. Berdasarkan wawancara dengan konselor di SMA Negeri 1 Muntilan alokasi jam masuk kelas bagi BK memang tidak ada. Mengingat pentingnya fungsi layanan BK maka konselor tetap berusaha memberikan layanan kepada peserta didik dengan cara melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran lain.

Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada peserta didik mereka merasa sudah terfasilitasi dengan layanan BK meskipun tidak ada alokasi jam masuk kelas bagi BK. Peserta didik merasa bisa memilih jurusan berdasarkan arahan dari konselor, selain itu konselor selalu memberikan informasi terkait dengan sekolah, sebagai sarana penyegaran, dan sebagai sarana konsultasi. Konselor dirasa begitu perhatian terhadap peserta didik sehingga banyak peserta didik yang datang ke ruang BK untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Kesenjangan yang terjadi di SMA Negeri 1 Muntilan dengan sekolah lain yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas bagi BK tersebut yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

memperoleh informasi secara objektif, mendalam, dan menyeluruh mengenai kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. Kinerja konselor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan program BK, pelaksanaan program BK, evaluasi kegiatan BK, dan mekanisme kerja administrasi BK.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Muntilan. Subjek dari penelitian ini meliputi kepala sekolah, waka kurikulum, koordinator BK, konselor sekolah, dan siswa. Penetapan sumber data (informan) dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Sumber data primer diperoleh langsung dari interaksi peneliti dengan kepala sekolah, waka kurikulum, koordinator BK, konselor sekolah, dan siswa melalui kegiatan observasi serta wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi penelitian seperti foto-foto, website resmi SMA Negeri 1 Muntilan.

Metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, observasi serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan model Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data, meliputi *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Penelitian ini menggunakan tiga pengecekan sebagai kredibilitas data yakni ketekunan pengamatan, *member check*, dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja konselor merupakan hasil kerja konselor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan BK kepada peserta didik. Pelayanan BK yang diberikan kepada peserta didik meliputi perencanaan program BK, pelaksanaan program BK, evaluasi kegiatan BK, dan mekanisme kerja administrasi program BK.

Perencanaan Program BK adalah kegiatan awal yang dilakukan oleh konselor dalam melaksanakan layanan konseling kepada peserta didik. Dalam kegiatan perencanaan program BK yang dilakukan oleh konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntilan sudah baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkat-

kan yaitu pada kegiatan analisis kebutuhan lingkungan dan penentuan jadwal layanan dan kegiatan pendukung BK.

Analisis kebutuhan peserta didik di SMA Negeri 1 Muntitan dilakukan di awal tahun ajaran baru. Konselor sekolah disana melakukan aplikasi instrumentasi menggunakan AKS (Angket Kebutuhan Peserta didik) dan melakukan himpunan data yang didapatkan dari berbagai pihak. Analisis kebutuhan ini digunakan sebagai modal dasar dalam merencanakan program BK, sehingga konselor sekolah dapat menjabarkan hasil analisis kebutuhan tersebut ke dalam program tahunan sampai pada program mingguan.

Program yang baik adalah program yang disusun sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik dan lingkungan. Namun untuk tahun ini TSP dan EWS tidak melakukan analisis kebutuhan lingkungan. Hal ini disebabkan karena EWS menganggap bahwa sasaran BK adalah peserta didik maka tidak perlu melakukan analisis kebutuhan lingkungan. Sehingga dalam pembuatan program EWS dan TSP hanya melibatkan peserta didik saja dalam merencanakan program BK.

Penentuan tujuan BK yang dilakukan di SMA Negeri 1 Muntitan didasarkan pada hasil kebutuhan dari peserta didik. Selain itu tujuan BK disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah yang mengarah pada perkembangan peserta didik secara optimal. Di SMA Negeri 1 Muntitan konselor sekolah menggunakan AKS (Angket Kebutuhan Peserta didik) yang dibuat sendiri oleh koordinator BK. Hanya EWS saja yang menambah DCM untuk melakukan kebutuhan terhadap peserta didik. Alasan pembuatan dan penggunaan AKS dikarenakan item-item dari instrumen lain seperti DCM, ITP, dan IKMS terlalu banyak dan fokusnya terlalu luas.

Tidak adanya alokasi jam masuk kelas bagi BK mengakibatkan adanya keprioritasan pemberian layanan. Layanan BK lebih sering diberikan kepada kelas XII dan jenis layanan yang sering diberikan adalah layanan informasi dan layanan konsultasi yang lebih condong ke bidang karir.

Konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntitan umumnya menentukan jadwal kegiatan BK secara insidental. Mereka membuat jadwal kegiatan ketika sudah melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran lain sehingga jadwal kegiatan yang mereka miliki dibuat secara insidental. Jadwal kegiatan secara insidental mengakibatkan adanya kesenjangan waktu an-

tara program bulanan dan mingguan. Untuk pengelolaan anggaran dana dan fasilitas BK di SMA Negeri 1 Muntitan dikelola sendiri oleh para konselor, namun melalui konsultasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah. Konselor membuat proposal kepada sekolah ketika ingin mengajukan anggaran dana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terlihat kesenjangan kenyataan yang ada sehingga bisa dikatakan bahwa perencanaan program BK yang dibuat oleh konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntitan masih kurang optimal pada kegiatan analisis kebutuhan lingkungan dan penentuan jadwal layanan dan kegiatan pendukung BK.

Pelaksanaan program BK adalah implementasi nyata dari program BK yang sudah direncanakan sebelumnya oleh konselor sekolah. Meskipun SMA Negeri 1 Muntitan tidak memberikan alokasi jam masuk kelas bagi BK tetapi konselor sekolah disana wajib melaksanakan program yang sudah dibuat sebelumnya.

Proses menentukan jam masuk kelas di SMA Negeri 1 Muntitan dilakukan ketika rapat dengan seluruh guru di sekolah kemudian pembagian jamnya ditentukan sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang digunakan di SMA N 1 Muntitan adalah kurikulum 2013. Menurut penuturan kepala sekolah dan Waka Kurikulum BK tidak masuk ke dalam struktur pelajaran sehingga sekolah tidak memberikan alokasi jam masuk kelas bagi BK. Terdapat kesenjangan pemahaman mengenai posisi BK dalam kurikulum 2013, sebab Permendikbud No. 81a Tahun 2013 BK memiliki volume kegiatan tatap muka 2 jam per kelas.

Koordinator BK di SMA Negeri 1 Muntitan kerap mengusulkan adanya jam masuk kelas kepada waka Kurikulum dan kepala sekolah namun memang sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Selain itu dikarenakan SMA Negeri 1 Muntitan menerapkan sistem 5 hari kerja sehingga jam pelajaran menjadi sangat padat yaitu lebih dari 48 jam setiap minggu. Hal ini yang menyebabkan BK tidak memungkinkan jika diberi jam untuk masuk kelas.

BK mencakup empat bidang bimbingan (Winkel, 2012) namun dalam pelaksanaannya EWS lebih memfokuskan pada bidang karir. Hal ini menunjukkan bahwa EWS harus memberikan pelayanan BK ke semua bidang bimbingan. Perkembangan karir peserta didik tidak akan berjalan optimal ketika peserta didik memiliki permasalahan di bidang pribadi, sosial, ataupun belajar.

Selanjutnya pada bagian pelaksanaan je-

nis layanan BK umumnya konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntitan sudah melaksanakan semua jenis layanan meskipun dengan porsi yang sangat berbeda. Perbedaan pemberian porsi layanan ini disebabkan karena BK tidak memiliki alokasi jam masuk kelas sehingga ketika ingin memberikan layanan klasikal dan kelompok agak kesulitan. Konselor Sekolah harus meminta jam pelajaran dari guru mata pelajaran lain, sedangkan tidak semua guru mau untuk memberikan jam pelajarannya.

Untuk layanan kelompok minim dilakukan karena terbentur oleh waktu. Layanan kelompok harus direncanakan dengan baik karena memang terbentur dengan tidak adanya waktu. Sedangkan untuk layanan individual sering dilakukan. Jika peserta didik membutuhkan layanan individual langsung dilayani oleh konselor sekolah. Adanya tuntutan 19 kali memberikan layanan ditekankan pada layanan individual sebab layanan individual waktunya mudah disesuaikan dan tidak harus dilakukan didalam jam pelajaran.

Jumlah konselor sekolah dengan jumlah peserta didik yang ada sebenarnya sudah ideal. Jika dipukul rata setiap konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntitan mendapatkan peserta didik binaan sebanyak 220 orang peserta didik. Seorang konselor sekolah diharuskan untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan pelayanan paling sedikit kepada 150 peserta didik paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang peserta didik.

Pihak yang terlibat dalam pembagian peserta didik asuh bagi konselor sekolah hanyalah koordinator BK dengan konselor sekolah. Pembagian peserta didik asuh dilakukan per-kelas, sehingga pembagian tersebut dapat diketahui bahwa jumlah peserta didik asuh yang dimiliki oleh masing-masing konselor sekolah tidak merata. SYG memiliki jumlah peserta didik asuh sejumlah 294 orang peserta didik sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik asuh yang dimiliki SYG melebihi kriteria.

Kesenjangan yang nampak di SMA Negeri 1 Muntitan mengakibatkan pelaksanaan program BK yang dilakukan oleh konselor sekolah belum bisa sepenuhnya menjangkau semua peserta didik. Layanan yang diberikan kepada peserta didik belum merata. Konselor sekolah lebih banyak memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi yang materinya mengarah pada bidang karir. Dan tidak semua peserta didik mendapatkan layanan dari konselor sekolah sebab layanan yang sering diberikan adalah layanan individual. Pe-

serta didik yang mendapatkan layanan BK dari konselor sekolah fokusnya lebih kepada mereka yang sedang memiliki permasalahan saja. Menurut penuturan koordinator BK persentase peserta didik yang mendapat layanan hanya sekitar 80% saja.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bahwa konselor sekolah dalam memberikan layanan BK kepada peserta didik masih belum optimal tetapi mereka tidak tinggal diam. Mereka mencari strategi yang lebih tepat untuk memenuhi tuntutan beban kerja konselor sekolah. Salah satunya dengan memberikan layanan individual secara intensif dan melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik.

Di SMA N 1 Muntitan yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas evaluasi dilakukan untuk mengetahui program mana yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. Dalam evaluasi kegiatan BK ada 4 komponen yang dievaluasi, yaitu komponen peserta didik, komponen program, komponen proses, dan komponen hasil.

Evaluasi yang dilakukan oleh konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntitan bisa dikatakan masih kurang optimal, sebab konselor sekolah masih belum begitu paham mengenai evaluasi kegiatan BK. Seperti pada pelaksanaan evaluasi peserta didik, semua konselor sekolah sebenarnya melakukan evaluasi peserta didik dengan cara mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara mendalam. Keempat subjek melakukan aplikasi instrumentasi dan himpunan data pada awal tahun ajaran baru untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, namun dari keempat subjek hanya STN yang bisa menjelaskan prosedur pelaksanaan evaluasi peserta didik secara tepat.

Untuk evaluasi program semua konselor sekolah melakukan sebab sudah menjadi agenda rutin yang dimasukkan ke dalam program kerja BK. Sedangkan dalam evaluasi proses keempat konselor sekolah sudah melakukannya hanya saja hal yang dievaluasi belum menyeluruh. Begitu pula dengan pelaksanaan evaluasi hasil sudah dilakukan dengan baik oleh konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntitan.

Konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntitan juga membuat laporan kegiatan bimbingan dan konseling yang berupa agenda harian sedangkan untuk laporan secara utuh berupa laporan BK dalam satu tahunnya. Selain itu evaluasi kegiatan BK juga sudah dicantumkan pada program kerja BK.

Mekanisme kerja yang dilakukan oleh

personel sekolah dalam pelaksanaan BK sudah baik. Kerja sama antara personel sekolah dengan konselor sekolah juga sudah berjalan dengan baik. Kepala sekolah mudah dalam mencairkan anggaran dana, wali kelas melaporkan kepada BK jika memiliki peserta didik yang memiliki masalah, dan guru lain memberi masukan kepada guru BK. Sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme kerja personel BK sudah baik meskipun masih ada pandangan negatif terhadap guru BK.

Sedangkan untuk mekanisme administrasi program BK yang dibuat oleh konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntitan sudah baik. Administrasi yang dibuat sudah lengkap, sistematis, dan rapi. Mulai dari asassmen, program BK, satuan layanan (satlan), satuan pendukung (satkung), kemudian laprlprog, laporan kunjungan rumah, laporan konseling individu, dan rekapitulasi pelaksanaan layanan, Program BK, satlan, rekapitulasi pelaksanaan, lapelprog.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme kerja administrasi BK yang dilakukan oleh konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntitan sudah baik meskipun masih ada pandangan negatif terhadap konselor sekolah. Sehingga konselor sekolah perlu meningkatkan koordinasi dengan guru mata pelajaran lain.

SIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa kinerja konselor yang tidak memiliki alokasi jam pembelajaran di SMA Negeri 1 Muntitan berjalan cukup baik. Perencanaan program BK di SMA Negeri 1 Muntitan bahwa sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi pada kegiatan analisis kebutuhan lingkungan sekolah belum dilakukan dengan sempurna sebab konselor sekolah tidak melibatkan *stakeholder* dan personel sekolah lainnya dalam perencanaan program BK. Selain itu penentuan jadwal kegiatan BK dibuat secara insidental setelah melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran lain.

Pelaksanaan program BK di SMA Negeri 1 Muntitan berjalan kurang optimal sebab tidak adanya alokasi jam masuk kelas ketika konselor sekolah ingin memberikan layanan kepada peserta didik. Tidak adanya alokasi jam masuk kelas ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan guru. Landasan yang digunakan dalam penentuan jam masuk kelas

adalah kurikulum. SMA Negeri 1 Muntitan menggunakan kurikulum 2013 yang menurut waka kurikulum BK tidak masuk ke dalam struktur kurikulum.

Menurut permendiknas No 81A tahun 2013 BK seharusnya memiliki jam masuk kelas 2 jam perminggu setiap kelasnya. Hal pertama yang mengakibatkan ketidakefektifan pelaksanaan program BK dikarenakan ada kecenderungan untuk menonjolkan salah satu bidang bimbingan yaitu bidang karir. Kemudian tidak semua jenis layanan BK diberikan kepada peserta didik dengan porsi yang sama. Tidak adanya alokasi jam masuk kelas mengakibatkan konselor sekolah lebih banyak melakukan layanan individual sehingga tidak semua peserta didik mendapatkan layanan BK.

Pembagian jumlah peserta didik asuh yang tidak merata di SMA Negeri 1 Muntitan juga menyebabkan ketidakefektifan layanan yang diberikan kepada peserta didik. Koordinator BK menyampaikan bahwa hanya 80% peserta didik SMA Negeri 1 Muntitan yang mendapatkan layanan BK dengan baik.

Evaluasi kegiatan BK SMA Negeri 1 Muntitan berjalan cukup baik hanya saja konselor sekolah masih memiliki wawasan yang kurang mendalam terhadap evaluasi peserta didik dan evaluasi proses. Tetapi konselor sekolah merekap kegiatan evaluasi BK dengan laporan BK yang menyatakan ada kegiatan evaluasi dan tindak lanjut.

Mekanisme kerja administrasi BK di SMA N 1 Muntitan berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 1) koordinasi yang baik antara konselor sekolah dengan personel sekolah yang lain; dan 2) administrasi kegiatan BK yang dibuat oleh konselor sekolah sangat lengkap, sistematis, dan rapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyasa. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Mensukseskan MBS dan KBK*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Munib, Achmad dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT UNNES Press.
- Novianto, dkk. 2013. *Studi Tentang Alokasi Jam Masuk Kelas Bagi Bk Dan Dampaknya Di Sekolah Menengah Negeri Se-Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro*. Jurnal Bk Unesa
- Salmawati. 2010. *Kinerja Konselor dalam Menghadapi Siswa Usia Pubertas di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Surabaya*. Skripsi IAIN Sunan Ampel
- Prayitno & Erman Amti. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Winkel, W.S & M.M Sri Hastuti. 2012. *Bimbingan dan*

- Konseling (di Institusi Pendidikan)*. Yogyakarta: Media Abadi
- Wibowo, Mungin Eddy. 2013. *Rancangan Implementasi Bimbingan dan Konseling Dalam Kurikulum 2013*. Makalah disajikan dalam acara seminar nasional dengan tema Reposisi Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013. Unnes. Semarang. 30 November 2013.
- Republik Indonesia. *UU No 20 Tahun 2003*. Sistem Pendidikan Nasional. Depdiknas
- Republik Indonesia. *UU No 27 Tahun 2008*. Sistem Pendidikan Nasional. Depdiknas
- Republik Indonesia. *Permendiknas No 81A Tahun 2013*. Sistem Pendidikan Nasional. Depdiknas